

ANALISIS OPTIMALISASI KOMANDO PENYELAM DAN PENYELAMATAN BAWAH AIR KOARMADA RI GUNA MENDUKUNG TUGAS TNI AL

Natsir Dimyati¹, Wahyudin Arif², Untung Tarmanto³

¹Politeknik Angkatan Laut, email: natsirpenyelam40@gmail.com

Abstract Security and sovereignty in these waters have a very important role in maintaining the integrity of the state. Therefore, the Indonesian Navy (TNI AL) as one of the components of national defense plays a major role in protecting and maintaining the sovereignty of Indonesia's maritime territory. One of the elements that supports the role of the Indonesian Navy in securing Indonesian waters is the Indonesian Navy's Underwater Diving and Rescue Command (Koppeba). Koppeba has special responsibility in carrying out underwater diving and rescue operations covering a wide range of missions, including search and rescue, maintenance and repair of underwater infrastructure, as well as monitoring and protection activities of national assets in and around Indonesian waters. This research aims to conduct an analysis of the optimization of the Indonesian Navy's Underwater Diving and Rescue Command (Koppeba) in supporting the duties of the Indonesian Navy (TNI AL). The use of the NVivo application is used to collect, organize and analyze data related to Koppeba's role in the context of maritime defense. This research explores the extent to which Koppeba can be increased in supporting the Indonesian Navy's operations in Indonesian waters. The research method involves document analysis, interviews and surveys which are then analyzed using NVivo to identify patterns, trends and opportunities in an effort to optimize Koppeba's role. The results of this research highlight several recommendations for increasing Koppeba's role in supporting the Indonesian Navy, including improving training and equipment, development of cross-agency collaboration, as well as the use of advanced technology in diver operations and underwater rescue. This research provides valuable insight for stakeholders in efforts to strengthen Indonesia's maritime defense capabilities through optimizing Koppeba Koarmada.

Keywords: Diver, Water Bottom Rescue, Indonesian Navy Duties.

Abstrak - Keamanan dan kedaulatan di perairan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga integritas negara. Oleh karena itu, TNI Angkatan Laut (TNI AL) sebagai salah satu komponen pertahanan negara memegang peran utama dalam melindungi dan menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Salah satu elemen yang mendukung peran TNI AL dalam mengamankan perairan Indonesia adalah Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air (Koppeba) Koarmada RI. Koppeba memiliki tanggung jawab khusus dalam melaksanakan operasi penyelaman dan penyelamatan bawah air yang mencakup berbagai misi, termasuk pencarian dan penyelamatan, pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur bawah air, serta kegiatan pengawasan dan perlindungan aset nasional di dalam dan di sekitar perairan Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis optimalisasi Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air (Koppeba) Koarmada dalam mendukung tugas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL). Penggunaan aplikasi NVivo digunakan untuk mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisis data yang terkait dengan peran Koppeba dalam konteks pertahanan maritim. Penelitian ini menggali sejauh mana Koppeba dapat ditingkatkan dalam mendukung operasi TNI AL di perairan Indonesia. Metode penelitian melibatkan analisis dokumen, wawancara, dan survei yang kemudian dianalisis menggunakan NVivo untuk mengidentifikasi pola, tren, dan peluang dalam upaya mengoptimalkan peran Koppeba. Hasil penelitian ini menyoroti beberapa rekomendasi untuk meningkatkan peran Koppeba dalam mendukung TNI AL, termasuk peningkatan pelatihan dan peralatan, pengembangan kolaborasi lintas lembaga, serta penggunaan teknologi canggih dalam operasi penyelam dan penyelamatan bawah air. Penelitian ini memberikan wawasan berharga bagi pemangku kepentingan dalam upaya memperkuat kemampuan pertahanan maritim Indonesia melalui optimalisasi Koppeba Koarmada.

Kata Kunci: Penyelam, Penyelamatan Bawah Air, Tugas TNI AL



UJoST

e-ISSN: 2962-9179



Universal Journal of Science and Technology

Vol. 2 No. 2 (2023)

PENDAHULUAN

Perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dewasa ini memengaruhi penyelenggaraan pertahanan negara. Dinamika lingkungan strategis yang perlu dicermati di antaranya pertumbuhan ekonomi yang berimplikasi pada perkembangan kekuatan militer global.[1] Dinamika ini sangat memengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks dan multidimensional, berupa ancaman militer, ancaman nonmiliter dan ancaman hibrida yang dapat dikategorikan dalam bentuk ancaman nyata dan belum nyata.[2] Wujud ancaman tersebut di antaranya terorisme dan radikalisme, separatisme dan pemberontakan bersenjata, bencana alam, pelanggaran wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian kekayaan alam, wabah penyakit, serangan siber dan spionase, peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta konflik terbuka atau perang konvensional.[3] Perkembangan wujud ancaman ini menjadi tantangan yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pertahanan negara di Indonesia. TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang merupakan salah satu matra dari TNI memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keamanan dan pertahanan negara Indonesia dalam Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang.[4] Dalam Operasi Militer Perang (OMP), TNI AL berperan aktif dalam menghadapi ancaman militer dari negara atau pihak asing.

Tugas utama mereka meliputi pengawalan kapal perang dan KoKoarmada laut, menjaga kedaulatan laut Indonesia, serta mempertahankan wilayah perairan nasional dari kemungkinan invasi atau ancaman militer lainnya. Selain itu, TNI AL juga bertugas melakukan Operasi Laut Gabungan (Opslagab), Operasi Pendaratan Administrasi (Opsratmin), Operasi Pertahanan Pantai (Opshantai) dan Operasi Amfibi, yang melibatkan pendaratan pasukan dari laut ke darat untuk mengamankan wilayah yang diancam oleh musuh.[5] Sementara dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP), TNI AL berperan dalam misi kemanusiaan dan penegakan hukum di perairan Indonesia dan di sekitar wilayah maritim tetangga. Dalam hal ini, mereka dilibatkan dalam operasi pencarian dan penyelamatan, penanggulangan bencana alam, dan pemberantasan ilegal, seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, dan perompakan laut.[6] Tugas ini menunjukkan komitmen TNI AL dalam menjaga keamanan dan ketertiban di perairan regional, sehingga menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayah maritim Indonesia dan kawasan sekitarnya. Tugas-tugas TNI AL dalam OMP dan OMSP menunjukkan bahwa Angkatan Laut Indonesia merupakan kekuatan yang siap menghadapi tantangan dan ancaman dari segala arah.[7] Dengan dedikasi dan profesionalisme, TNI AL terus berupaya menjaga kedaulatan dan integritas wilayah laut negara, serta memberikan kontribusi positif bagi perdamaian dan kemanusiaan dalam skala regional dan global. Penyelenggaraan pertahanan negara ditujukan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.[8] Penyelenggaraan Pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Komponen Utama (Komput) yang diperkuat oleh Komponen Cadangan (Komcad) dan Komponen Pendukung (Komduk).[9]

TNI Angkatan Laut sebagai bagian dari Tentara Nasional Indonesia merupakan Komponen Utama (Komput) pertahanan negara dalam bidang maritim. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, TNI AL sebagai kekuatan utama pertahanan negara di laut mengerahkan kekuatan dalam bentuk penggelaran dan penggunaan kekuatan untuk menjamin adanya kehadiran di laut serta tercapainya kepentingan dan tujuan nasional.[10] Penggelaran kekuatan diwujudkan dalam bentuk gelar manuver yang melibatkan Kapal Republik Indonesia (KRI), Pesawat Udara (Pesud), Marinir dan Pangkalan dalam rangka melaksanakan operasi baik Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air (Koppeba) Koarmada RI merupakan unsur pelaksana di bawah Koarmada RI yang

mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam merumuskan kebijakan, menyelenggarakan pembinaan, gelar operasi penyelaman dan penyelamatan bawah air dalam rangka mendukung operasional Koarmada RI untuk kepentingan TNI Angkatan Laut, TNI maupun pertahanan lainnya serta mendukung pembangunan nasional, dalam pelaksanaan operasi penyelaman dan penyelamatan bawah air melibatkan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) yang berada di bawah jajaran Komando Koarmada I, II dan III. Di dalam melaksanakan tugas, Dislambair sebagai penyelenggara penyelaman dan penyelamatan bawah air, baik dalam rangka pembinaan dan pengoperasian kekuatan prajurit penyelam untuk mendukung kekuatan Koarmada Bernomor maupun untuk kepentingan TNI/TNI Angkatan Laut serta dalam mendukung pembangunan nasional sebagaimana yang dibebankan kepada Koarmada Republik Indonesia. Dislambair merupakan satuan kedinasan yang dalam pembinaannya berada di bawah Koppeba Koarmada RI. Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) adalah satuan kerja dimana prajurit pengawak berkualifikasi Brevet Penyelam TNI Angkatan Laut, dengan bidang profesi penyelaman dan penyelamatan bawah air dimana tugas. Dislambair merupakan satuan kedinasan yang memiliki satuan pelaksana (Satlak) didalamnya, maka perlu disesuaikan dengan merubah nomenklatur dari Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) menjadi Satuan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air (Satkoppeba) karena belum sesuai dengan matrik struktur jabatan yang ada dalam peraturan dan sekaligus agar penyebutan nama satuan Koppeba linier dengan Koppeba Koarmada RI sebagai satuan pembina.

METODE

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dimana melaksanakan wawancara kepada pejabat yang terkait.[11] Analisis Optimalisasi Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air Koarmada RI Guna Mendukung Operasi Militer Selain Perang. Peneliti juga melakukan triangulasi data atas semua data primer yang didapat terhadap sumber data, yaitu antar narasumber, antar kelompok narasumber, serta narasumber terhadap dokumen yang digunakan sebagai sumber data sekunder dalam penelitian ini. Dimana untuk mempermudah proses triangulasi data, peneliti menetapkan subyek penelitian dengan membagi narasumber menjadi tiga kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok Regulator (Pembuat Kebijakan)

Pada kelompok Regulator, peneliti menetapkan Komandan Koppeba yaitu Laksamana Pertama TNI Darmansyah, sebagai unsur pimpinan Komando Penyelaman dan Penyelamatan Bawah Air Koarmada RI. Selanjutnya Kadislambair I Koarmada I, sebagai unsur pimpinan Dinas Penyelaman dan Penyelamatan Bawah air Koarmada I.

2. Kelompok Operator (Pelaksana Kebijakan)

Pada kelompok Operator ini, peneliti menetapkan Direktur Operasi Komando Penyelaman dan Penyelamatan Bawah Air Koarmada RI, sebagai salah satu staf dibidang operasi dan latihan pada satuan pelaksana di jajaran Komando Penyelaman dan Penyelamatan Bawah Air Koarmada RI. Selanjutnya adalah Kasirenopslat Dislambair I sebagai salah satu staf dibidang operasi dan latihan pada Dislambair I Koarmada I.

3. Kelompok Pengamat

Pada kelompok Pengamat ini, peneliti menetapkan Kasubdis Operasi Koppeba Koarmada RI. Selanjutnya adalah Kasiharfaskhus Dislambair I salah satu staf dibidang pemeliharaan fasilitas khusus Dislambair I. Wawancara yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini dan selanjutnya dilakukan pengolahan data

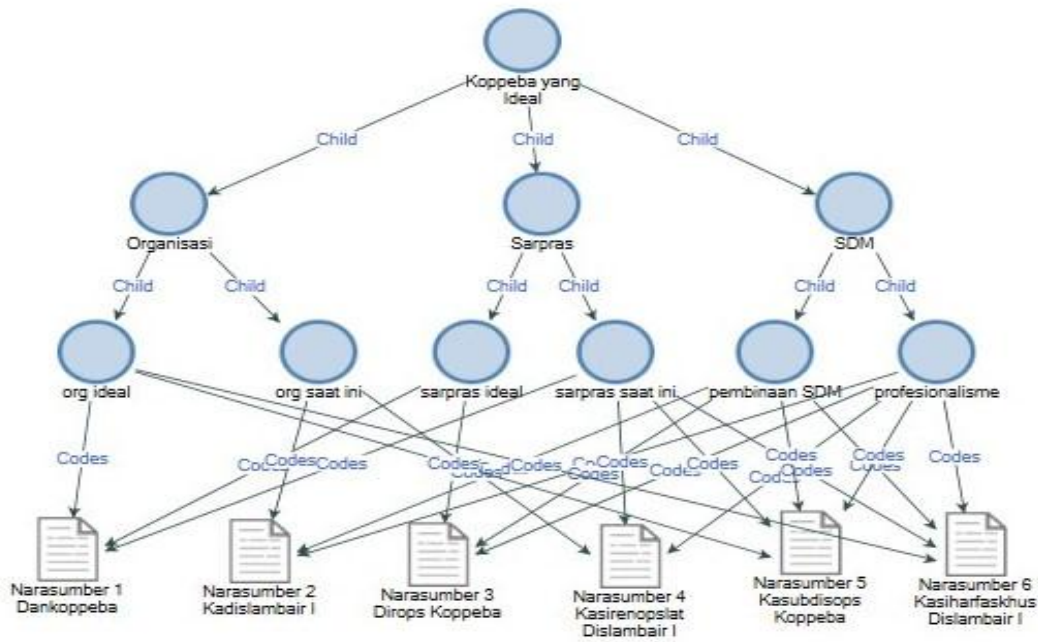


dengan menggunakan tools NVivo yang bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan analisa data.[13]

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Data

Analisis kualitatif dengan NVivo membantu meningkatkan pemahaman tentang persepsi, perspektif dan pengalaman narasumber. Pada gambar 1 menunjukkan keterkaitan antara rumusan masalah dan pertanyaan penelitian dihubungkan dengan tanggapan dari para narasumber. Pada visualisasi ini, teknik triangulasi data dapat diterapkan menggunakan narasumber yang berbeda-beda dari segi pangkat, jabatan dan lokasi kedinasan, serta dibagi menjadi tiga kelompok (Regulator, Operator dan Pengamat). Kelompok Regulator terdiri dari Dankoppeba dan Kadislambair I. Kelompok Operator terdiri dari Dirops Koppeba dan Kasirenopslat Koppeba. Dan Kelompok Pengamat yang terdiri dari Kasubdisops Koppeba dan Kasiharfaskhus Dislambair I.



Sumber: Hasil olahan peneliti

Gambar 1. Visualisasi rumusan masalah, pertanyaan penelitian dan data wawancara

Tahap selanjutnya adalah melaksanakan analisis data dari hasil triangulasi data pada hasil NVivo. Analisis data dilakukan untuk pengelompokan jawaban tiap informan baik yang sepaham maupun yang bertentangan berikut alasan yang dimiliki oleh informan itu sendiri. Pada gambar 1 memberikan uraian singkat terkait dengan pendapat dari tiap-tiap informan.

- a. Bahwasanya untuk Organisasi Koppeba belum efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas, salah satu permasalahannya karena struktur organisasi yang tidak ada garis komando antara Koppeba dengan Dislambair, dan Koppeba sebagai satuan Komando yang harus memiliki satuan pelaksana akan tetapi saat ini Koppeba tidak memiliki satuan pelaksana.



- b. Sebaiknya Koppeba merubah nomenklaturnya menjadi Balakpus sehingga ada kewenangan dalam melaksanakan pembinaan Operasi, Latihan juga material, selain itu mempunyai anggaran untuk melaksanakan pembinaan tersebut.
- c. Kemampuan penyelam masih harus ditingkatkan dengan melaksanakan pelatihan atau kursus dari luar negeri
- d. Profesionalime harus ditingkatkan dengan mengadakan Latihan dan kursus
- e. Sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini masih kurang, serta peralatan penyelaman sudah banyak yang tidak layak.
- f. Perlunya modernisasi peralatan penyelaman dan peralatan pekerjaan bawah air guna mengoptimalkan dalam melaksanakan tugas serta menjaga keamanan bagi para penyelam

2. Pembahasan

a. Bidang Organisasi

Peneliti menganalisa dari hasil wawancara bahwa permasalahan yang pertama adalah bentuk organisasi Koppeba yang dibentuk saat ini tik maksimal dalam menjalankan tugasnya dalam rangka mendukung Operasi Militer Selain Perang, dimana seharusnya Koppeba yang berbentuk organisasi Komando harus memiliki satuan pelaksana dibawahnya, dan itu sesuai dengan aturan organisasi TNI. Sehingga dalam pelaksanaan dilapangan Koppeba yang diharapkan menjadi Pembina dari penyelam tidak bisa maksimal karena tidak ada jalur komando. Secara administrasi Koppeba dibawah Koarmada RI sehingga dalam pengelolaan anggaran binopslatpun mengikuti dari anggaran Binopslat Koarmada RI. Idealnya untuk struktur organisasi Koppeba menjadi Badan Pelaksana Pusat, sehingga mempunyai kemandirian baik dalam hal pembinaan maupun dalam anggaran. Dislambair yang merupakan satuan penyelam yang sudah ada saat ini juga tidak linier dengan Koppeba, idealnya Dislambair merubah nomenklaturnya menjadi Satuan Koppeba.

Salah satu konsep yang dapat menjelaskan situasi ini adalah "*flat organizational structure*" atau struktur organisasi datar. Dalam struktur organisasi datar, tingkat hierarki atau lapisan manajemen dikurangi secara signifikan. Satuan komando tanpa satuan pelaksana di bawahnya dapat ditemukan dalam struktur ini, di mana terdapat lebih sedikit tingkatan manajemen antara level puncak dan level operasional. Dalam struktur organisasi datar, tujuannya adalah mengurangi birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, dan meningkatkan fleksibilitas serta komunikasi antarunit. Dengan kurangnya satuan pelaksana di bawah satuan komando, komunikasi dan koordinasi dapat lebih langsung dan efisien. Keputusan dapat diambil secara lebih cepat, tanpa perlu menunggu persetujuan atau arahan dari tingkatan manajemen yang lebih tinggi. Penerapan struktur organisasi datar dengan satuan komando tanpa satuan pelaksana di bawahnya dapat ditemukan dalam organisasi yang relatif kecil, startup, atau organisasi dengan budaya kerja yang lebih kolaboratif. Dalam hal ini, pekerjaan mungkin didistribusikan secara horizontal antara tim atau departemen yang setara secara hierarki

b. Bidang Sumber Daya Manusia



Dalam organisasi dengan personel yang sedikit, fleksibilitas menjadi aspek penting. Dengan jumlah personel yang terbatas, setiap individu di organisasi mungkin memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan terlibat dalam berbagai tugas dan peran. Dalam organisasi dengan personel yang sedikit, individu cenderung memainkan peran ganda atau memiliki tanggung jawab yang beragam. Mereka mungkin harus menggabungkan beberapa fungsi atau departemen, sehingga memerlukan keterampilan multitasking dan fleksibilitas yang tinggi. Dalam organisasi kecil, komunikasi antarindividu dapat lebih mudah dilakukan. Komunikasi yang langsung dan terbuka dapat terjadi secara lebih efisien karena jumlah personel yang terbatas. Ini memungkinkan pertukaran informasi yang lebih cepat, pengambilan keputusan yang lebih efektif, dan kolaborasi yang lebih dekat antara prajurit.

Analisis optimalisasi profesionalisme prajurit adalah proses mengidentifikasi dan mengevaluasi keterampilan, pengetahuan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan oleh seorang prajurit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan tingkat profesionalisme yang tinggi. Seorang prajurit profesional harus memiliki tingkat disiplin yang tinggi dalam menjalankan tugas dan mengikuti peraturan dan prosedur yang ditetapkan. Mereka harus mampu menghormati atasan, mengikuti kode etik militer, serta memiliki kepatuhan terhadap tata tertib dan rutinitas yang berlaku.

c. Bidang Sarana dan Prasarana

Pentingnya memiliki sarana, prasarana, dan peralatan yang memadai bagi prajurit dalam mencapai hasil yang optimal. Sarana yang tepat, seperti fasilitas pelatihan dan pendukung operasional yang memadai, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi prajurit dalam menjalankan tugas mereka. Prasarana yang memadai, seperti fasilitas messing, perawatan kesehatan, dan komunikasi yang baik, juga dapat memastikan kesejahteraan dan kesiapan prajurit dalam menjalankan tugas. Selain itu, optimalisasi peralatan yang digunakan oleh prajurit juga sangat penting. Dalam hal ini, pembahasan dapat mencakup pentingnya memastikan bahwa prajurit memiliki peralatan yang sesuai dan memadai untuk menjalankan tugas mereka. Peralatan yang baik, alat selam, peralatan pekerjaan bawah air, komunikasi, dan transportasi, dapat meningkatkan efektivitas dan keselamatan prajurit di medan tempur.

Dalam hal teori optimalisasi sarana, prasarana, dan peralatan, pembahasan juga dapat membahas strategi dan pendekatan yang digunakan untuk memastikan pengelolaan yang efektif dan efisien dari aset-aset tersebut. Misalnya, pembahasan dapat mencakup kebijakan perawatan dan pemeliharaan rutin, penggantian peralatan yang usang atau tidak efektif, dan pengembangan sarana dan prasarana yang lebih baik sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan operasional. Penggunaan teori optimalisasi sarana, prasarana, dan peralatan dalam pembahasan ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pentingnya pengelolaan yang baik terhadap aset-aset tersebut dan bagaimana hal itu dapat berkontribusi terhadap kesuksesan operasional prajurit. Selain itu, pembahasan juga dapat menyoroti tantangan dan strategi yang terkait dengan optimalisasi sarana, prasarana, dan peralatan dalam konteks yang lebih luas, seperti anggaran terbatas, perubahan teknologi, dan perubahan kebutuhan operasional.

KESIMPULAN

TNI Angkatan Laut merupakan komponen utama pertahanan negara dalam bidang maritim dan bertanggung jawab untuk menjaga keamanan laut serta kepentingan nasional di wilayah

tersebut. Untuk melaksanakan tugas tersebut, TNI AL mengerahkan kekuatan berupa kapal, pesawat udara, marinir, dan pangkalan dalam operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas ini adalah Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air (Koppeba) Koarmada RI, yang bertanggung jawab merumuskan kebijakan, melaksanakan pembinaan, serta menggelar operasi penyelaman dan penyelamatan bawah air.

Koppeba Koarmada RI juga bekerja sama dengan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) yang berada di bawah Komando Koarmada I, II, dan III. Dislambair merupakan satuan kedinasan dengan prajurit berbrevet penyelam TNI Angkatan Laut, yang memiliki tugas utama dalam penyelaman dan penyelamatan bawah air. Namun, diperlukan penyesuaian dalam nomenklatur satuan ini menjadi Satuan Komando Penyelam dan Penyelamatan Bawah Air (Satkoppeba) agar sesuai dengan struktur jabatan yang ada dalam peraturan dan agar sejalan dengan Koppeba Koarmada RI sebagai satuan pembina. Dalam keseluruhan konteks ini, peran TNI AL dalam melindungi wilayah laut dan kepentingan nasional sangat penting, dengan Koppeba dan Satkoppeba memiliki peran kunci dalam menjalankan tugas penyelamatan dan penyelamatan bawah air demi mendukung operasional TNI Angkatan Laut dan pembangunan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Strategi *et al.*, "the Relevance of Marine Defense Strategy Based on Jalesveva Jayamahe Doctrine on Globalization and Strategic Environment Development," *Strateg. Pertahanan Laut*, pp. 77–100, 2021.
- [2] I. M. Ali, L. Yudo, and D. Sianturi, "Sea Defense Strategy in Facing Maritime Security Threat in Indonesia'S Sea," *J. Prodi Strateg. Pertahanan Laut*, vol. 6, no. 2, pp. 169–188, 2021.
- [3] A. Akmalina *et al.*, "Strategi pemerintah indonesia dalam penanggulangan ancaman narcoterrorism," pp. 45–70, 2019.
- [4] M. Syafira and K. Fatima, "Sinergitas Badan Narkotika Nasional Dengan Pemerintah Daerah Dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir Transnasional Peredaran Gelap Narkoba Di Kalimantan Barat Untuk Pertahanan Negara," *J. Ilm. Kaji. Keimigrasian Politek. Imigrasi*, vol. 4, no. 1, pp. 97–115, 2021.
- [5] Eni, "Strategi Integrasi Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I Dan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Pada Operasi Militer Dalam Mendukung Kampanye Militer," *J. Inov. Penelit.*, vol. 2, no. 9, pp. 3107–3114, 2022.
- [6] R. S. Wicaksono, R. Harto, J. Herman, A. Info, and A. History, "Peran KRI Dr Wahidin Sudirohusodo sebagai Unsur SAR , Evakuasi VVIP dan Evakuasi Medis dalam Rangka Operasi Militer selain Perang di Laut Maritim Indonesia," vol. 6, pp. 5894–5898, 2023.
- [7] I. Putra and A. F. Lubis, "Operasi Militer Selain Perang (OMSP) Tni Untuk Mengatasi Aksi Terorisme Dalam Perspektif Ham Dan Penegakan Hukum," *JISIP (Jurnal Ilmu Sos. dan Pendidikan)*, vol. 6, no. 2, pp. 4122–4128, 2022, doi: 10.58258/jisip.v6i2.3097.
- [8] M. Zhuo, J. Rumengan, and H. Aspan, "Analisis Yuridis Kewenangan Kesatuan Penjagaan Laut Dan Pantai Dalam Penindakan Pelanggaran Hak Lintas Damai Pelayaran Di Perairan Indonesia," *Mizan J. Ilmu Huk.*, vol. 9, no. 2, pp. 95–102, 2020, [Online]. Available: <https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/Mizan/article/view/1094>
- [9] I. G. P. Suryawan, S. Ladjide, and S. F. Riyadi, "Peran Tentara Nasional Indonesia



UJoST

e-ISSN: 2962-9179



Universal Journal of Science and Technology

Vol. 2 No. 2 (2023)

Angkatan Laut Dalam Perwujudan Good Order At Sea: Studi Kasus Alur Laut Kepulauan Indonesia II," *J. Selat*, vol. 8, no. 2, pp. 149–158, 2021, doi: 10.31629/selat.v8i2.3537.

- [10] A. D. A. Sulistyono and A. Afriansyah, "Komitmen Indonesia Dalam Pelindungan Warisan Budaya Bawah Air Di Perairan Indonesia," *Verit. Justitia*, vol. 7, no. 2, pp. 271–296, 2021, doi: 10.25123/vej.v7i2.4339.
- [11] A. Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah J. Ilmu Dakwah*, vol. 17, no. 33, p. 81, 2019, doi: 10.18592/alhadharah.v17i33.2374.
- [12] Y. Afiyanti, "Validitas Dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif," *J. Keperawatan Indones.*, vol. 12, no. 2, pp. 137–141, 2008.
- [13] F. Soehardi, L. D. Putri, and M. Dinata, "NVivo Software Training for Young Researchers," *Mattawang J. Pengabd. Masy.*, vol. 2, no. 1, pp. 8–13, 2021, doi: 10.35877/454ri.mattawang265.